

Anomali Perilaku Pemilih: Faktor di Balik Kemenangan Kolom Kosong di Kecamatan Sumbang dalam Pilkada Banyumas 2024

Adelya Sofiana Permansah, Ahmad Rofik, Ahmad Sabiq
Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas Jenderal Soedirman
adelya.permansah@unsoed.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai faktor dibalik kemenangan kolom kosong di Kecamatan Sumbang dalam Pilkada Banyumas 2024. Kolom kosong hadir sebagai bentuk opsi alternatif bagi masyarakat yang tidak menginginkan untuk memilih pasangan calon yang disediakan. Penelitian ini berusaha mencari jawaban mengapa masyarakat lebih memilih kolom kosong dibanding pasangan calon tunggal yang ada, serta faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kemenangan kolom kosong di Kecamatan Sumbang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Fenomenologi, dimana data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, hingga melalui dokumen-dokumen penunjang penelitian. Teknik pengambilan sampel responden menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan masyarakat pemilih kecamatan Sumbang sebagai narasumber kunci, juga terdapat berbagai narasumber pembanding seperti KPU, Bawaslu, Partai Politik, serta Media. Temuan dalam penelitian ini masyarakat Kecamatan Sumbang lebih memilih kolom kosong karena didasari oleh 3 pendekatan perilaku pemilih, yaitu sosiologis yang tercermin pada pengaruh dari masifnya gerakan Koalisi Rakyat Banyumas (KRB) juga dipengaruhi oleh faktor interaksi sosial kedekatan kekerabatan, psikologis yang lebih menekankan perasaan kekecewaan pada indikator orientasi kandidat, dan pendekatan rasional dimana masyarakat mengekspresikan tindakan protes melalui pilihan non konvensional yang lahir dari adanya perhitungan untung rugi. Pendekatan rasional sendiri merupakan yang paling dominan, terlihat dari pilihan masyarakat Kecamatan Sumbang terhadap kolom kosong sebagai bentuk kesadaran politik dan protes atas calon tunggal yang tersedia. Selain itu, faktor kontekstual atau faktor dari luar individu tercermin pada adanya kampanye KRB sehingga membentuk opini kolektif dan ketiadaan kandidat lain.

Kata Kunci: Pilkada Banyumas 2024, perilaku pemilih, kolom kosong, calon tunggal.

Pendahuluan

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi tonggak krusial dalam demokrasi Indonesia, menggambarkan secara nyata bahwa kekuasaan politik sejatinya berada di tangan rakyat, sebagai penentu arah pemerintahan daerah. Menurut (R. Siti Zuhro, et al., 2009) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi ajang strategis dalam proses pergantian kepemimpinan di tingkat daerah sebagai bentuk nyata pelaksanaan demokrasi yang melibatkan partisipasi masyarakat. Melalui mekanisme pemilihan langsung, diharapkan aspirasi rakyat dapat

tersalurkan secara lebih autentik sekaligus mendorong penguatan kualitas demokrasi di ranah lokal. Artinya, pelaksanaan Pilkada menjadi wadah bagi masyarakat untuk memberikan haknya untuk menentukan calon pemimpinnya sendiri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan hingga kemajuan bagi suatu daerah. Namun dalam perjalanannya, polemik kerap terjadi semenjak ketentuan yang tercantum dan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Nomor 8 Tahun 2015 bersamaan dengan Peraturan KPU 12/2015 yang mewajibkan Pilkada sekurang-kurangnya harus diikuti oleh dua pasangan calon. Regulasi tersebut akhirnya memicu proses peninjauan Mahkamah Konstitusi dengan diperkenalkannya mekanisme plebisit yang tercantum dalam Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015, kemudian diberhentikan dan diberlakukannya metodologi pemilihan dengan format suara, dimana satu kolom menampilkan gambar pasangan calon sedangkan kolom sebelahnya dibiarkan kosong (Rizki Ramadani, 2025). Sejak saat itu kolom kosong marak digunakan di Indonesia, khususnya pada Pilkada 2024.

Maraknya fenomena kolom kosong pada akhirnya membawa konsekuensi serius terhadap dinamika perilaku pemilih. Kondisi ini membuka ruang untuk menelaah lebih dalam berbagai pertimbangan yang melatarbelakangi pilihan politik seseorang baik dalam menentukan dukungan kepada partai atau kandidat tertentu, maupun dalam menjatuhkan pilihan pada kolom kosong sebagai bentuk sikap dalam arena kontestasi politik. Menurut Surbakti (1992), perilaku memilih dimaknai sebagai proses pengambilan keputusan yang dilakukan individu untuk menentukan pilihan, baik dengan memberikan suara maupun tidak memberikan suara sebagai wujud partisipasi warga negara dalam pemilihan umum. Dalam hal ini pemilih dipahami sebagai bagian dari pemegang kekuasaan tertinggi karena pemilih dibebaskan untuk mendukung, memberikan suaranya, bahkan tidak memilih sama sekali dengan bergantung pada perasaan terwakili atau tidak terhadap kandidat maupun partai politik sebagai alat perpanjangan lidah masyarakat. Kini, interaksi antara kandidat dan pemilih cenderung tidak lagi stabil, dipicu oleh meningkatnya sikap kritis masyarakat serta melemahnya ikatan-ikatan tradisional dan primordial yang sebelumnya menjadi dasar hubungan tersebut. Lebih dari itu, masyarakat juga semakin aktif mengevaluasi berbagai aspek kinerja partai-partai hingga kandidat terpilih yang telah memimpin daerahnya.

Pada konteks Pilkada Banyumas 2024, kolom kosong berhasil memperoleh 368.790 (40,56%) suara. Fenomena ini menandai babak baru dalam sejarah Pilkada Banyumas sejak 2008, dengan munculnya kolom kosong yang untuk pertama kalinya berhadapan langsung dengan pasangan calon tunggal, Sadewo-Lintarti (Yanuar, 2024). Meskipun pada akhirnya kolom kosong belum mampu mengalahkan pasangan calon Sadewo-Lintarti dengan perolehan 540.554 (59,44%) dari total suara, kolom kosong tetap menunjukkan eksistensinya pada Pilkada Banyumas 2024.

Tabel 1. Perolehan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas 2024

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN HASIL SUARA	
		Sadewo-Lintarti	Kolom Kosong
1.	Purwokerto Utara	11. 434 (46,75%)	13.022 (53,25)
2.	Purwokerto Barat	13.264 (48,25%)	14.225 (51,75%)
3.	Purwokerto Timur	13.674 (48,85%)	14.318 (51,15%)
4.	Sumbang	22.783 (49,10%)	23.618 (50,90%)
5.	Purwokerto Selatan	19.116 (50,83%)	18.493 (49,17%)
6.	Baturraden	14.677 (51,18%)	14.000 (48,82%)
7.	Patikraja	16.523 (51,76%)	15.402 (48,24%)
8.	Banyumas	14.880 (54,45%)	12.449 (45,55%)
9.	Kembaran	23.064 (54,78%)	19.036 (45,22%)
10.	Sokaraja	26.374 (55,81%)	20.881 (44,19%)
11.	Karanglewass	20.080 (55,93%)	15.823 (44,07%)
12.	Kalibagor	16.360 (56,80%)	12.444 (43,20%)
13.	Wangon	25.502 (61,94%)	15.672 (38,06%)
14.	Kedungbanteng	21.343 (62,52%)	12.795 (37,48%)
15.	Cilongok	42.708 (63,39%)	24.669 (36,61%)
16.	Ajibarang	34.649 (63,48%)	19.932 (36,52%)
17.	Tambak	15.045 (63,81%)	8.531 (36,19%)
18.	Rawalo	16.184 (64,39%)	8.951 (35,61%)
19.	Pekuncen	23.510 (64,72%)	12.813 (35,28%)
20.	Kebasen	21.597 (64,86%)	11.701 (35,14%)
21.	Jatilawang	21.537 (65,72%)	11.235 (34,28%)
22.	Purwojati	11.957 (66,74%)	5.959 (33,26%)
23.	Sumpiuh	19.190 (66,79%)	9.541 (33,21%)
24.	Lumbir	16.807 (67,45%)	8.111 (32,55%)
25.	Somagede	13.206 (67,50%)	6.359 (32,50%)
26.	Kemranjen	24.328 (68,92%)	10.971 (31,08%)
27.	Gumelar	20.762 (72,59%)	7.838 (27,41%)

Sumber: KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Banyumas (dikelola oleh penulis)

Berdasar data di atas, peneliti mengutip data yang bersumber dari *website* resmi KPU Banyumas dengan perolehan suara kolom kosong yang tinggi secara signifikan di 4 Kecamatan dari 27 Kecamatan di Banyumas, antara lain Kecamatan Purwokerto Barat, Purwokerto Timur, Purwokerto Utara, dan Sumbang. Kemenangan kolom kosong di wilayah perkotaan, misalnya di Purwokerto Timur, Purwokerto Barat, dan Purwokerto Utara biasanya dapat disebabkan oleh pendidikan yang lebih tinggi yang memungkinkan pemilih untuk mengakses juga lebih kritis terhadap akses informasi yang lebih luas. Pengaruh media sosial juga berperan penting dalam penyebaran opini dan kritik masyarakat terhadap pemerintahan lokal, yang akhirnya mendorong perilaku memilih masyarakat yang rasional. Maka dari itu, kemenangan kolom kosong umumnya terpusat pada wilayah perkotaan, seperti yang terjadi pada Pilwalkot Makassar Tahun 2018 dalam (Ilham & Purwaningsih, 2021). Dalam hal ini terdapat perbedaan akses informasi, tingkat pendidikan, hingga struktur sosial yang dapat memengaruhi pola partisipasi politik masyarakat yang pada akhirnya berimplikasi pada perbedaan preferensi politik dalam kontestasi elektoral.

Tabel. 2 Perolehan Suara Partai Politik di Kecamatan Sumbang

No	Partai Politik	Perolehan Hasil Suara	
		2019	2024
1.	PKB	5.007 (8,9%)	6.651 (11,7%)
2.	Gerindra	3.608 (6,4%)	6.881 (12,1%)
3.	PDIP	18.039 (32,4%)	20.965(37,11%)
4.	Golkar	3.180 (5,7%)	2.151 (3,8%)
5.	Nasdem	7.094 (12,7%)	2.197 (3,88%)
6.	Buruh	-	159 (0,28%)
7.	Gelora	-	534 (0,94%)
8.	PKS	2.969 (5,3%)	5.943(10,52%)
9.	PKN	-	75 (0,13%)
10.	Hanura	289 (0,51%)	45 (0,07%)
11.	Garuda	-	80 (0,14%)
12.	PAN	1.485 (2,6%)	2.332 (4,1%)
13.	Bulan Bintang	157 (0,28%)	26 (0,04%)
14.	Demokrat	2.377 (4,2%)	2.208 (3,9%)
15.	PSI	157 (0,28%)	438 (0,77%)
16.	Perindo	-	228 (0,40%)
17.	P3	4.222 (7,5%)	5.140 (9,1%)
18.	Ummat	-	426 (0,75%)
19.	Gerakan Perubahan Indonesia	162 (0,29%)	-
20.	Berkarya	435 (0,78)	-
21.	Persatuan Indonesia	2.159 (3,8%)	-
22.	Persatuan Pembangunan	4.222 (7,5%)	-
23.	Keadilan dan Persatuan Indonesia	82 (0,14%)	-
TOTAL		55.644 (100%)	56.479 (100%)

Sumber: KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Banyumas (dikelola oleh penulis)

Berdasar data di atas dalam perolehan suara partai politik yang paling dominan pada Pileg tahun 2019 hingga tahun 2024 dengan perolehan suara yang mendominasi adalah PDI Perjuangan. Berdasarkan data resmi KPU Banyumas, pada Pileg tahun 2019, PDI Perjuangan berhasil mendapatkan suara 18.039 (32,4%), pada tahun 2024 PDI Perjuangan kembali mendominasi dengan perolehan 20.965(37,11%) serta kembali mendapat kursi terbanyak dibandingkan partai lainnya dengan mendapatkan 17 kursi (Abdulrahman, 2024). Kemenangan kolom kosong di Kecamatan Sumbang dapat dikatakan anomali, karena pada pemilihan legislatif dari tahun ke tahun, mayoritas masyarakat Kecamatan Sumbang memilih PDI Perjuangan, akan tetapi pada Pilkada Banyumas 2024 justru pasangan calon yang diusung oleh PDIP beserta koalisi gemuknya kalah. Wilayah ini juga kerap disebut sebagai basis PDIP. Pemilih di Sumbang mungkin memilih PDIP untuk wakil rakyat karena terdapat kedekatan personal maupun proogram-program yang ditawarkan. Namun, memilih kolom kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah dimanifestasikan berbeda sebagai protes terhadap ketiadaan pilihan calon lain. Dalam hal ini, loyalitas pada partai tidak selalu berbanding lurus dengan kepatuhan pada instruksi pilihan kepala daerah, terutama di wilayah Sumbang.

Tabel 3. Distribusi Penggunaan Hak Pilih Pemilih di Kecamatan Sumbang dalam Pilkada Banyumas 2024

No.	Penggunaan Hak Pilih	Jumlah Suara	Persentase
1.	Memilih Kandidat	22.783	31,2%
2.	Memilih Kolom Kosong	23.618	32,3%
3.	Surat Suara Rusak	3.124	4,3%
4.	Tidak Datang ke TPS	23.567	32,2%
Total DPT		73.092	100%

Sumber: KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Banyumas (dikelola oleh penulis)

Sebagaimana data yang telah disajikan di atas, tabel tersebut mengilustrasikan bagaimana pemilih di Sumbang menggunakan hak pilih mereka yang dibagi menjadi beberapa kategori, seperti memilih kandidat, memilih kolom kosong, surat suara yang rusak dan yang tidak datang ke TPS. Data menunjukkan total DPT (Daftar Pemilih Tetap) sebanyak 73.092, dengan kolom kosong yang memperoleh 23.628 (32,3%) suara, yang secara mengejutkan mengungguli pemilih

yang memilih pasangan calon dengan 22.783 (31,2%). Angka tersebut menunjukkan kuatnya kecenderungan masyarakat Sumbang untuk menjatuhkan pilihan pada kolom kosong sebagai ekspresi protes dan ketidakpuasan terhadap kehadiran calon tunggal. Sikap tersebut mencerminkan bentuk partisipasi politik yang tetap aktif, di mana pemilih memanfaatkan hak suaranya untuk mengekspresikan ketidakpuasan terhadap dinamika demokrasi lokal yang dianggap kurang kompetitif, karena dominasi satu pasangan calon yang didukung oleh 12 partai politik.

Selain itu, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih atau golput juga tergolong tinggi, mencapai 23.567 orang (32,2% dari total DPT), hampir setara dengan persentase pemilih yang memilih kolom kosong. Angka golput ini menandakan bahwa adanya apatisme atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap Pilkada 2024 lalu, dimana sebagian pemilih memilih untuk tidak datang ke TPS daripada memberikan suara baik untuk pasangan calon tunggal maupun kolom kosong. Perbandingan perolehan suara antara kolom kosong dengan yang tidak datang ke TPS merepresentasikan bahwa sebagian pemilih di Sumbang mengekspresikan kekecewaan dan penolakan secara eksplisit melalui kolom kosong, sementara sebagian masyarakat lainnya memilih untuk abstain yang diinterpretasikan sebagai bentuk kekecewaan dan ketidakpedulian terhadap opsi yang ada.

Pada tahap pencalonan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banyumas 2024, awalnya muncul lebih dari satu pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang berencana mendaftar. Salah satu pasangan calon awalnya mendapatkan dukungan dari koalisi enam partai politik, yaitu Partai NasDem, Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Buruh, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Namun, setelah dilakukan verifikasi administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyumas, ditemukan bahwa pasangan Ma'ruf Cahyono-Yulianti Supriyatiningsih tidak memenuhi 2 persyaratan, yaitu syarat pencalonan dan syarat calon yang memang belum dilengkapi. Karena pendaftaran melalui aplikasi Silonkada (Sistem Informasi Pencalonan) yang berbasis teknologi, maka pendaftaran secara otomatis tertutup pada 4 September 2024 pukul 23.59 WIB, sedangkan perbaikan dokumen tidak dapat dilakukan sehingga pihak KPU mengembalikan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon Bupati Ma'ruf Cahyono dan Yulianti Supriyati Ningsih yang otomatis gugur dari

pencalonan. Kondisi tersebut menjadikan Pilkada Banyumas 2024 hanya diikuti oleh satu pasangan calon tunggal, yaitu Sadewo Tri Lastiono-Dwi Asih Lintarti, yang didukung oleh koalisi politik besar yang mencakup 12 partai, termasuk PDIP, PKB, PKS, PAN, PPP, Gerindra, Golkar, Demokrat, NasDem, serta tiga partai non-parlemen, yakni Perindo, Gelora Indonesia, dan Ummat.

Kehadiran kolom kosong seringkali dianggap sebagai opsi dalam Pilkada yang dinilai sebagai ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan sikap penolakan terhadap kandidat yang ada dalam sebuah sistem pemungutan suara. Akan tetapi, kehadiran kolom kosong tidak selamanya dianggap sebagai lawan untuk bersaing, melainkan dijadikan sebagai opsi untuk melihat apakah satu kandidat yang dicalonkan dianggap layak atau tidak oleh rakyat (Universitas Airlangga, 2024). Pasangan calon tunggal yang umumnya didukung oleh koalisi besar dan memiliki modal politik serta finansial yang dominan seharusnya dapat memenangkan kontestasi dengan mudah, akan tetapi faktanya tidak semudah itu karena dinamika politik tertentu.

Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2025, ditegaskan bahwa pelaksanaan Pilkada dengan calon tunggal tetap sejalan dengan prinsip demokrasi di Indonesia. Ketentuan tersebut memberikan ruang bagi pemilih untuk menentukan sikap, baik dengan mendukung pasangan calon yang ada maupun secara tegas menyatakan penolakan melalui pilihan kolom kosong. Alih-alih sebagai solusi, kehadiran kolom kosong nyatanya justru menimbulkan masalah baru pada pesta demokrasi di Indonesia. Eksistensi kolom kosong sebagai alternatif terhadap pasangan calon tunggal menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan dinamika baru dalam praktik demokrasi elektoral di tingkat lokal. Jika meninjau data dari beberapa tahun terakhir, keberadaan kolom kosong dalam Pilkada di Indonesia meningkat dari yang awalnya hanya terdapat tiga daerah pada Pilkada 2015, menjadi sembilan daerah pada 2017, lalu meningkat menjadi 16 daerah pada 2018, meningkat kembali menjadi 25 daerah pada Pilkada 2020, dan puncaknya mencapai dua kali lipat dengan 41 daerah pada Pilkada serentak 2024 (Singgih Wiryono, 2024).

Fenomena kolom kosong dalam Pilkada dengan calon tunggal telah banyak dikaji, seperti penelitian yang dilakukan (Panjaitan et al., 2024) yang menjelaskan bahwa Pilkada calon tunggal dengan kolom kosong dapat terjadi apabila terdapat kekuatan atau *power* yang sangat besar dari pasangan calon yang muncul apalagi jika calon

tersebut merupakan *incumbent* atau calon petahana. Kekalahan calon tunggal dalam suatu kontestasi politik merupakan bukti serta bentuk pembelajaran bagi kandidat serta partai-partai politik yang menjadi kendaraan politiknya yang kemudian ini dijelaskan menurut (Ilham & Purwaningsih, 2021) yang terjadi pada Pilkada Walikota Makassar dalam penelitiannya. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa mesin politik pasangan calon tunggal meliputi partai pendukung, jaringan relawan, dan tim pemenangan belum berfungsi secara maksimal dalam menggalang dukungan hingga membujuk pemilih. Fenomena kolom kosong ini dapat timbul karena adanya dukungan oleh seluruh partai politik terhadap satu kandidat.

Dukungan yang diarahkan hanya kepada satu kandidat kemudian memunculkan kolom kosong sebagai alternatif pilihan, seperti yang terdapat dalam penelitian (Hartas, D. A. Kushandajani & Erowati, 2023). Menurutnya, kolom kosong dapat dijadikan alternatif pilihan bagi masyarakat yang tidak mengenal atau bahkan tidak menyukai *track record* pasangan calon tunggal. Selain itu, terdapat pendapat lain menurut (Aqsah, Bs, 2024) yang menyebutkan bahwa kemenangan kolom kosong juga dapat disebabkan oleh adanya faktor kekecewaan dari masyarakat, karena masyarakat tidak diberikan pilihan dengan kompetisi yang sehat untuk menentukan calon kepala daerahnya. Selain itu, terdapat faktor-faktor sosiologis, psikologis, pendekatan struktural, dan rasional yang juga dapat dengan mudah untuk membingkai dan memahami pola perilaku memilih masyarakat di Banten dalam Pemilihan Gubernur Banten (Az-Zahra, 2025).

Meskipun semakin banyak literatur yang meneliti kajian mengenai kolom kosong pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia, kajian hingga saat ini umumnya hanya dilakukan pada tingkat Kota/Kabupaten dan menekankan aspek elektoral atau kelembagaan partai. Seperti menganalisis penyebab fenomena pemilihan dengan calon tunggal (misalnya, oligarki politik, lobi dan modal keuangan), peran gerakan sosial dalam memobilisasi protes terhadap kandidat tunggal, hingga dampaknya bagi kualitas demokrasi. Namun masih sangat terbatas penelitian yang mengkaji fenomena kemenangan kolom kosong hingga tingkat Kecamatan sebagai arena politik mikro, sekaligus menggunakan analisis melalui perspektif perilaku pemilih. Maka dari itu, artikel ini mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji Kecamatan Sumbang sebagai lokus penelitian.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah Mengapa asyarakat Kecamatan Sumbang memilih kolom kosong dibandingkan calon tunggal pada Pilkada Banyumas 2024? dan Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi kemenangan kolom kosong di Kecamatan Sumbang? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis mengapa masyarakat Kecamatan Sumbang memilih kolom kosong dibandingkan calon tunggal pada Pilkada Banyumas 2024 serta untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang memengaruhi kemenangan kolom kosong di Kecamatan Sumbang.

Tinjauan Pustaka

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas yang dilakukan pada 27 November 2024 yang lalu menjadi ajang besar bagi partai pendukung maupun kandidat tunggal dalam mengumpulkan dukungan sebanyak-banyaknya. Tak hanya pasangan calon, kolom kosong yang dipelopori Setya Adri Wibowo yang tergabung dalam gerakan Koalisi Rakyat Banyumas (KRB) tersebut juga melakukan sosialisasi besar-besaran. Adapun KRB ini merupakan wujud masyarakat yang merasa tidak terwakilkan, ketidakpuasan, hingga kekecewaan pada Pilkada Banyumas 2024. Dalam konteks kemenangan kolom kosong di Kecamatan Sumbang, untuk menganalisis faktor dibalik kemenangannya tersebut, peneliti menggunakan konsep perilaku pemilih.

Menurut (Surbakti, 1992) perilaku pemilih didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan oleh individu untuk memilih atau tidak memilih, yang merupakan wujud partisipasi warga negara dalam pemilihan. Secara garis besar, pemilih merupakan subjek krusial dalam mempertahankan demokratisasi negara. Perilaku pemilih termasuk dalam ranah perilaku politik, yang dipengaruhi oleh beragam faktor. Faktor internal meliputi idealisme, tingkat intelektual, dan kehendak pribadi, sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan, seperti kondisi keagamaan, sosial, politik, ekonomi, dan aspek-aspek lain yang membentuk konteks kehidupan masyarakat. Berdasar hal tersebut, yang menjadi perhatian disini adalah mengenai alasan mengapa seseorang tersebut memilih kolom kosong dibandingkan kandidat calon tunggal yang juga dapat disebut sebagai perilaku pemilih. Perilaku pemilih menurut Ramlan Surbakti dalam hal ini dapat dibagi menjadi lima teori pendekatan yang menjadi faktor memilih mereka, yaitu pendekatan struktural, pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis sosial, pendekatan ekologis, dan pendekatan rasional.

Pertama, dari perspektif pendekatan struktural, Surbakti memandang perilaku memilih sebagai hasil dari konteks struktural yang lebih luas. Konteks ini mencakup struktur sosial, seperti etnis, agama, status sosio-ekonomi, dan faktor lainnya serta sistem partai, mekanisme pemilihan umum, dan isu atau program yang dikedepankan oleh partai politik maupun calon kepala daerah. Pada pendekatan ini, preferensi mereka dibentuk oleh posisi struktural dalam jangka panjang sehingga perilaku memilih menjadi sebuah ekspresi dari sosial-politik yang

yang terukur dalam masyarakat.

Kedua, pendekatan sosiologis yang pertama kali ditemukan oleh Universitas Columbia (Columbia's University Bureau of Applied Social Science) atau yang dikenal sebagai Mazhab Columbia/Columbia School (Nugraha, 2023). Pendekatan ini menekankan bahwa perilaku memilih individu umumnya dipengaruhi oleh lingkungan sosial tempat mereka berada, di mana interaksi dan tekanan sosial membentuk preferensi politik serta keputusan pemilihannya. Dieter Roth menyatakan bahwa dari berbagai ikatan sosial yang ada di dalam masyarakat dapat dibagi menjadi tiga faktor utama seperti sosial-ekonomi, agama, dan daerah tempat tinggal (Purba, 2017). Setiap kelompok sosial yang terbentuk, pasti memiliki aturan-aturan yang berlaku dan ketaatan-ketaatan tersebut menciptakan keselarasan di dalamnya. Saiful Mujani et al., (Purba, 2017) menyebutkan agama merupakan salah satu faktor yang dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam kerangka pendekatan sosiologis. Secara mendasar, pendekatan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, agama, pekerjaan, latar belakang, serta partisipasi dalam kelompok formal maupun nonformal memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk perilaku pemilih.

Ketiga, pendekatan ekologis. Menurut Ramlan Surbakti, pendekatan ekologis hanya relevan diterapkan jika terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit wilayah, seperti desa, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Dengan kata lain, pendekatan ini penting untuk menganalisis perbedaan pola hasil pemilihan antara tingkat provinsi dengan kabupaten, atau antara kabupaten dengan kecamatan, sehingga perbedaan konteks teritorial dapat dipahami secara lebih mendalam.

Keempat, pendekatan psikologis sosial. Pendekatan psikologis ini berakar dari pemikiran Eropa Barat dan berkembang di Amerika Serikat. Konsep ini dikembangkan di University of Michigan, sehingga lebih dikenal dengan istilah Mazhab Michigan yang diperkenalkan oleh August Campbell (Asfar, 2002:141). Pendekatan ini berusaha mengkaji respon ketidakpuasan terhadap pendekatan sebelumnya, yaitu pendekatan sosiologis. Pendekatan ini didasari oleh konsep sikap dan sosialisasi. Terdapat tiga pusat perhatian pendekatan psikologis, yaitu yang pertama persepsi dan penilaian pribadi terhadap kandidat, yang kedua yaitu penilaian dan persepsi pribadi terhadap tema-tema yang diangkat, dan yang terakhir yaitu identifikasi partai yang merujuk pada persepsi pemilih terhadap partai

maupun kedekatan individu dengan partai tertentu. Pada dasarnya, pendekatan ini menekankan bahwa perilaku memilih seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh jaringan sosial tempat ia berada, tetapi juga oleh motivasi internal, seperti minat terhadap politik, ketersediaan informasi untuk membuat keputusan, keyakinan bahwa suaranya memiliki pengaruh, dan kepercayaan bahwa pilihannya dapat berkontribusi pada perbaikan kondisi masyarakat.

Kelima, pendekatan rasional (*rational choice*). Pemilih dalam pendekatan ini memilih calon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional, yang dalam menentukan pilihannya tidak lagi melihat lingkungan sosial, agama, jenis kelamin, latarbelakang, dan lain-lain, tetapi dapat juga menggunakan pendekatan ekonomi yang didasari atas perhitungan untung rugi. Pemilih rasional mengerucutkan orientasi pilihannya pada dua hal, yaitu mengenai isu dan kandidat. Pendekatan ini dipopulerkan oleh Anthony Downs, yang berasumsi bahwa pemilih bertindak secara rasional ketika membuat pilihan politik, tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti agama, jenis pekerjaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, kelas sosial, atau latar belakang lainnya (Istianah et al., 2025). Pemilih jenis ini akan berpikir lebih jauh bahwa apa yang mereka pilih akan berpengaruh signifikan dalam hasil yang mereka harapkan di kemudian hari.

Dalam ranah politik, masyarakat Indonesia diberikan hak dan kebebasan penuh untuk menentukan pilihan mereka sendiri. Perilaku pemilih mencerminkan dinamika politik yang muncul dari ketersediaan kandidat dan partai dalam kontestasi elektoral. Tidak semua calon atau partai disukai oleh pemilih, sehingga tak jarang mereka mengekspresikan protes (*protest voting*) atau ketidakpuasan terhadap opsi yang tersedia. Hal ini tercermin dalam berbagai bentuk pilihan alternatif, seperti mendukung partai kecil, memberikan suara kosong atau tidak sah, hingga memutuskan untuk abstain (Otjes et al., 2020). Salah satu manifestasi nyata dari sistem demokrasi terlihat melalui dinamika yang terjadi di partai politik serta ekspresi protes dari masyarakat sebagai pemilih seperti yang dikemukakan oleh (Birch & Dennison, 2019).

Para ahli memanifestasikan konsep *protest voting* dengan berbagai makna. *Protest voting* merupakan bentuk ekspresi ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan, ketidakpercayaan dalam sistem politik yang ada, kekecewaan terhadap elite politik yang berkuasa, dan perasaan marah karena ketidakadilan dan ketidakberuntungan yang dialami oleh kelompok tertentu (Mahpudin, 2021). Pada

dasarnya *protest voting* dapat dikaitkan dengan adanya ekspresi kekecewaan pemilih terhadap pilihan yang ada. Meskipun definisi *protest voting* sangatlah beragam dan manifestasinya melalui memilih pilihan yang bukan preferensi mereka, dalam hal ini *protest voting* juga dapat dimanifestasikan dengan memilih kolom kosong sebagai bentuk ekspresi kekecewaan, ketidakpercayaan, hingga ketidakpuasan masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian sendiri merupakan rangkaian langkah sistematis yang dilakukan untuk menemukan kebenaran dan pemahaman mendalam dalam suatu studi. Proses ini dimulai dari perumusan masalah, dibantu oleh pemahaman yang diperoleh dari penelitian sebelumnya, sehingga data yang dikumpulkan dapat diolah, dianalisis, dan pada akhirnya menghasilkan kesimpulan yang valid. Metode penelitian merupakan langkah ilmiah agar memperoleh data dengan tujuan manfaat (Sugiyono, 2006). Adapun yang dimaksud dengan metode penelitian kualitatif menurut Moleong (2018:6) adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami secara mendalam fenomena yang dialami oleh subjek, termasuk perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan aspek-aspek lain secara holistik. Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan deskripsi berbasis kata-kata dan bahasa, dalam konteks ilmiah tertentu, serta memanfaatkan berbagai metode ilmiah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, pada ajang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian studi lapangan memfokuskan pada pengamatan dan analisis fenomena yang terjadi dalam lingkungan alaminya, sehingga data yang diperoleh mencerminkan kondisi nyata dan kontekstual dari objek yang diteliti (Mulyana, 2004). Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data diperoleh melalui observasi di lapangan, wawancara mendalam, kajian literatur, dokumentasi hingga arsip. Berdasarkan jenis sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, observasi, serta studi dokumen, sehingga informasi yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan akurat mengenai

fenomena yang diteliti. Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan masyarakat pemilih Kecamatan Sumbang sebagai informan kunci diantaranya; Suwandi Koordinator Wilayah KRB Sumbang, Eka masyarakat desa Susukan, Arif masyarakat Desa Sikapat, Ratih masyarakat Desa Karanggintung, Imam masyarakat Desa Datar, Bagyo masyarakat Desa Sumbang, Satum masyarakat Desa Sumbang, dan Eni masyarakat Desa Tambaksogra serta beberapa informan pendukung seperti Sidiq Fathoni dari Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu (KPU Banyumas), Yon Daryono, Exsty Rumiati, dan Fahmi Nur Wicaksono dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Agus Wahyudi sebagai Kepala Biro Suara Merdeka Banyumas, Sony Bharata (Mantan Ketua PSI Banyumas), Arie Suprpto (Sekretaris DPC PDI-P Banyumas), Setya Adrie Wibowo sebagai Ketua Umum Koalisi Rakyat Banyumas (KRB).

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, di mana proses analisis dilakukan secara berulang melalui tahap-tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berkesinambungan, sehingga temuan penelitian tersusun dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Analisis ini dimulai dari pengumpulan data (*data collection*) yang dihasilkan dari hasil wawancara, observasi, hingga studi dokumen, setelah itu data yang sudah didapatkan kemudian direduksi/dirangkum (*data reduction*), hasil rangkuman tersebut kemudian disajikan baik dalam bentuk tabel maupun lain-lain sebagainya untuk menunjang penelitian (*data display*). Tahap terakhir dalam proses analisis adalah penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*), yaitu menyimpulkan temuan-temuan yang diperoleh dari data yang telah dianalisis untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian secara menyeluruh. Dalam penelitian ini, keabsahan data yang telah dilakukan yaitu melalui teknik triangulasi data, khususnya teknik triangulasi metode karena melibatkan penggunaan lebih dari satu metode seperti wawancara mendalam, observasi, hingga studi dokumen.

Pembahasan

Kemenangan Kolom Kosong di Kecamatan Sumbang Sebagai Bentuk Kekecewaan Masyarakat

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banyumas 2024 memberikan warna baru pada kontestasi kali ini, dengan munculnya fenomena kolom kosong pertama kalinya di Kabupaten Banyumas 2024. Munculnya calon tunggal menjadi indikator kuat atas menguatnya pragmatisme politik di tingkat elit, dimana pembentukan koalisi besar kerap mengenyampingkan nilai-nilai ideologis partai demi kemenangan instan. Melemahnya peran partai politik dalam menjalankan fungsi kaderisasi dan penyediaan alternatif kepemimpinan menyebabkan kontestasi kehilangan substansi kompetisinya. Akibatnya, demokrasi di Banyumas seolah terjebak dalam formalitas prosedural yang berdampak pada pembatasan ruang bagi munculnya figur-figur baru yang lebih kompetitif.

Fenomena ini mencerminkan adanya jurang pemisah antara tawaran politik dengan aspirasi masyarakat di berbagai wilayah. Ketidakmampuan kandidat dalam merepresentasikan kebutuhan publik, ditambah kekecewaan mendalam terhadap kinerja pemerintahan serta praktik politik yang dinilai menyimpang dari ekspektasi normatif, memicu adanya ketidakpuasan secara signifikan. Bagi banyak pemilih, tidak adanya pilihan alternatif dianggap sebagai kegagalan dalam memenuhi hak dasar mereka untuk memilih pemimpin yang benar-benar berpihak pada rakyat.

Tabel 4. Perolehan Suara Pilkada Banyumas 2024 di Kecamatan Sumbang

No	Desa	Sadewo-Lintarti	Kolom Kosong
1.	Sikapat	41,9%	58,1%
2.	Datar	42,2%	57,8%
3.	Banjarsari Wetan	43%	57%
4.	Susukan	43%	57%
5.	Banjarsari Kulon	43,5%	56,5%
6.	Gandatapa	44,7%	55,3%
7.	Sumbang	45,2%	54,8%
8.	Limpakuwus	46,3%	53,7%
9.	Karanggintung	47,2%	52,8%
10.	Tambaksogra	47,7%	52,3%
11.	Banteran	49,6%	50,4%
12.	Kawungcarang	50,2%	49,8%
13.	Kedungmalang	50,3%	49,7%
14.	Karangcegak	50,6%	49,4%
15.	Silado	51,3%	48,7%
16.	Karangturi	54,3%	45,7%
17.	Kebanggan	57%	43%
18.	Kotayasa	57,4%	42,6%
19.	Ciberem	61,5%	38,5%
TOTAL		22.783 (49,10%)	23.618 (50,90%)

Sumber: KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Banyumas (dikelola oleh penulis)

Tabel di atas menjelaskan bahwa dari 19 desa di Kecamatan Sumbang diantaranya terdapat 11 desa, diantaranya Sikapat, Datar, Banjarsari Wetan, Susukan, Banjarsari Kulon, Gandatapa, Sumbang, Limpakuwus, Karanggintung Tambaksogra dan Banteran dengan perolehan kolom kosong yang unggul secara signifikan. Terlebih, kemenangan telak kolom kosong dari pasangan calon tunggal didapatkan Desa Datar dan Desa Banjarsari Wetan di berbagai TPS di wilayah tersebut. Sedangkan pasangan calon tunggal hanya unggul di 8 desa di Kecamatan Sumbang. Opsi kolom kosong digunakan masyarakat sebagai bentuk mengekspresikan ketidakpuasan dan kekecewaan terhadap sistem demokrasi pada Pilkada Banyumas 2024. Tidak hanya itu, beberapa masyarakat

mengungkapkan bahwa kolom kosong dalam hal ini juga dianggap sebagai bentuk pencegahan dari tingginya tingkat abstain/golput dalam Pilkada Banyumas 2024. Dalam hal ini, peneliti akan menggunakan 3 pendekatan yang relevan dengan studi kasus di Kecamatan Sumbang, yaitu sosiologis, psikologis, dan pendekatan rasional. Adapun gambaran perilaku pemilih yang dimanifestasikan masyarakat Kecamatan Sumbang diantaranya sebagai berikut:

1. Pendekatan Sosiologis

Seperti yang telah dibahas dalam tinjauan pustaka, perilaku memilih individu umumnya dipengaruhi oleh lingkungan sosial tempat ia berada, serta oleh karakteristik dan pengelompokan sosial, termasuk usia, jenis kelamin, agama, pekerjaan, latar belakang, dan partisipasi dalam kegiatan kelompok formal maupun non-formal menurut Cyntia & Oktavianor dalam (Istianah et al., 2025). Oleh karena itu, pemahaman terhadap pengelompokan sosial baik secara formal, seperti keanggotaan dalam organisasi keagamaan, organisasi profesi, atau kelompok okupasi, maupun secara non-formal, seperti keluarga, pertemanan, atau kelompok-kelompok kecil sangat penting untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perilaku pemilih. Kelompok-kelompok ini memainkan peran signifikan dalam membentuk sikap, persepsi, dan orientasi politik individu. Pemilih jenis ini tidak bertindak secara individual sepenuhnya, melainkan terpengaruh oleh jaringan sosial atau kelompok-kelompok yang pada akhirnya membentuk identitas serta norma politiknya.

“Kan penggerak kolom kosongnya banyak, rata-rata memang orang sini (Sumbang) juga sih mbak. Rajin juga itu mereka sosialisasinya pake mobil keliling. Saya milih kotak kosong juga karena sebagian besar masyarakat sini milih kotak kosong sih, banyak juga yang merasa kecewa karena itu ada borong partai lah istilahnya,” (wawancara dengan Ratih, masyarakat Desa Karanggantung pada 6 Desember 2025).

Berdasar hasil wawancara, peneliti menganalisis melalui pendekatan sosiologis yang direpresentasikan dengan adanya pengaruh dari interaksi kelompok, seperti kampanye gerakan kolektif masyarakat sipil yang terorganisir ke dalam Koalisi Rakyat Banyumas (KRB) yang dinilai begitu masif, baik melalui sosial media maupun melalui sosialisasi/edukasi dari kecamatan per-kecamatan khususnya Sumbang sehingga membentuk opini kolektif di masyarakat. Dalam jenis pendekatan ini juga dijelaskan bahwa kelompok sosial yang terbentuk

kemudian akan memiliki aturan aturan maupun norma yang otomatis akan ditaati demi menciptakan keselarasan di dalamnya. Hal ini direpresentasikan dengan adanya masyarakat yang memilih kolom kosong sebagai bentuk keselarasan hasil dari interaksi sosial karena ikatan primordial di masyarakat khususnya di daerah pedesaan. Ini menunjukkan bahwa adanya produk dari tekanan sosial dan gerakan sipil kolom kosong yang kuat sehingga berkontribusi pada pilihan masyarakat yang lebih memilih kolom kosong dibanding pasangan calon tunggal.

2. Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologis muncul sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan sebelumnya, yaitu pendekatan sosiologis (Mazhab Columbia), yang secara metodologis dianggap sulit diukur secara akurat melalui indikator seperti kelas sosial, tingkat pendidikan, agama, dan lain-lain. Dalam pendekatan ini, pemilih menentukan pilihannya berdasarkan sikap dan perilaku politik yang bersumber dari dalam dirinya sendiri, termasuk idealisme, tingkat kecerdasan, faktor biologis, serta keinginan dan kehendak hati yang terbentuk melalui proses sosialisasi. Dengan kata lain, sikap individu mencerminkan kepribadian yang memengaruhi perilaku politiknya. Melalui pendekatan psikologis, masyarakat dipandang berpikir dan bertindak lebih maju dengan mempertimbangkan sikap atau emosi yang diyakini akan berdampak pada keputusan dan partisipasinya dalam kehidupan politik.

Dalam kerangka pendekatan psikologis, fokus diletakkan pada aspek-aspek psikologis yang memengaruhi keputusan memilih seseorang, antara lain ikatan emosional dengan partai politik atau identifikasi terhadap partai tertentu, orientasi terhadap isu-isu yang relevan, serta persepsi dan penilaian terhadap kandidat atau ketokohan yang bersangkutan (Surbakti, 1992). Jika dikaitkan dalam kemenangan kolom kosong di Sumbang, peneliti menemukan satu indikator tersebut dimana pemilih memilih kolom kosong dikarenakan penilaiannya atau orientasi terhadap ketokohan pasangan calon tunggal yang dinilai kurang memuaskan atau mengecewakan. Seperti yang disampaikan informan sebagai berikut:

“Saya kecewa mbak, belum lagi pada masa itu kepemimpinan sebelumnya, di Sumbang belum ada perubahan signifikan, apalagi kalo liat jalan dari Sumbang sebelah utara itu kan gak kayak jalan, tapi kayak sungai. Udah rusak parah itu gak dibener-benerin setahun lebih itu,” (Wawancara dengan Imam, masyarakat Desa Datar pada 13 Desember 2025).

Pendapat serupa juga disampaikan oleh informan lain sebagai berikut,

“Pak Sadewo itu waktu menjadi wakil bupati, beliau tidak pernah turun ke masyarakat. Ke bawah ga pernah turun kok,” (Wawancara dengan Suwandi, Koordinator Wilayah KRB Sumbang pada 29 November 2025).

Berdasar hasil wawancara tersebut, peneliti menganalisa melalui pendekatan psikologis yang tercermin dalam orientasi dan persepsi negatif mereka terhadap petahana Sadewo sebagai wakil bupati sebelumnya. Pendekatan ini menekankan aspek internal individu yang terbentuk oleh interaksi sosial dimana kekecewaan bukan emosi pribadi saja, melainkan respons psikologis terhadap pengalaman yang dirasa kurang memuaskan, seperti yang tercermin pada kurangnya perhatian terhadap masyarakat Sumbang dan ketidakmampuan untuk membangun kepercayaan selama masa kepemimpinannya. Masyarakat menilai bahwa Sadewo gagal memikat hati mereka, dimana jika melalui pendekatan psikologis masyarakat mengharapkan kandidat sebagai figur yang responsif juga empati, akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Selain itu, kekecewaan masyarakat juga tercermin terhadap pembangunan infrastruktur khususnya jalan raya yang menghubungkan dua desa, yaitu Desa Ciberem dan Desa Banteran yang dikategorikan lamban karena butuh waktu kurang lebih setahun hingga pada akhirnya diperbaiki.

3. Pendekatan rasional

Pemilih jenis ini merupakan pemilih yang memilih calon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional, yang dalam menentukan pilihannya tidak lagi melihat lingkungan sosial, agama, jenis kelamin, latarbelakang, dan lain-lain, tetapi dapat juga menggunakan pendekatan ekonomi yang didasari atas perhitungan untung rugi. Menurut Grofman dalam (Istianah et al., 2025), pendekatan ini seperti pemilih yang bertindak seperti konsumen dalam pasar politik, mengkalkulasikan untung-rugi sebelum menjatuhkan pilihannya. Perilaku memilih dalam pandangan teori pilihan rasional menjelaskan bahwa perilaku memilih bukanlah sebuah aksi, melainkan reaksi terhadap situasi atau hal-hal

tertentu yang dinilai merugikan. Hal ini sejalan dengan pendekatan ekonomi, yang menekankan pertimbangan utilitas atau keuntungan dalam pengambilan keputusan. Dalam kerangka ini, pemilih rasional dipandang sebagai individu yang cerdas, kritis, berani mengajukan tuntutan, dan tidak gampang terpengaruh atau disesatkan oleh elite politik saat menggunakan hak pilihnya. Masyarakat Kecamatan Sumbang dalam hal ini mengekspresikan ketidaksetujuan dan protesnya dalam pilihan non konvensional.

“Ini namanya demokrasi yang tidak wajar. Kalo calonnya lebih dari satu barangkali lebih bagus, akan tetapi tidak ada satu partai pun yang mencalonkan selain Pak Dewo yang akhirnya melahirkan kolom kosong. Seandainya kolom kosong yang menang secara total di Banyumas kan bisa mencari atau memilih calon yang lain yang mungkin lebih baik.” (Wawancara dengan Bagyo, masyarakat Desa Sumbang pada 16 Desember 2025).

Masyarakat Kecamatan Sumbang sempat mengalami dilematis yang disebabkan oleh pilihan yang sangat terbatas. Berdasar teori pendekatan rasional Anthony Downs dalam (Istianah et al., 2025), Downs tidak hanya berbicara mengenai keuntungan yang riil sudah di tangan, akan tetapi juga utilitas yang diharapkan. Maka dari itu, analisis hasil wawancara mengungkapkan bahwa masyarakat kecamatan Sumbang menilai bahwa opsi kolom kosong merupakan pilihan terbaik dibandingkan harus memilih pasangan calon tunggal yang mereka anggap tidak mampu menjamin kualitas demokrasi substantif. Keputusan ini dilakukan pemilih dengan kesadaran penuh bahwa memberikan dukungan kepada pasangan Sadewo-Lintarti nantinya akan beresiko kepada kebijakan yang hanya mementingkan elite dibanding kepentingan publik, mengingat besarnya beban hutang budi politik pada koalisi gemuk yang mengusungnya.

Memilih kolom kosong berfungsi sebagai mekanisme protes yang strategis serta rasional dibandingkan tindakan tidak memilih atau golongan putih (golput). Masyarakat Sumbang memahami bahwa memilih kolom kosong merupakan instrumen hukum yang sah untuk menyampaikan pesan politik tanpa harus mengorbankan hak pilih mereka dengan golput. Tindakan rasional ini mencerminkan adanya ekspektasi rasional bahwa kemenangan kolom kosong akan memaksa sistem untuk me reset melalui penyelenggaraan Pilkada ulang. Melalui hal tersebut, masyarakat berharap akan muncul kandidat yang lebih

kompetitif dan kredibel sehingga terciptanya ruang partisipasi bermakna.

“Saya pribadi bukan semata gak suka dengan calonnya, tapi masalahnya itu di cara mainnya. Kita ini bukan lagi masyarakat yang bodoh mbak, akses internet aja sekarang udah canggih, kita baca berita dimana-mana. Saya pilih kolom kosong itu sebenarnya biar ada rem-nya. Kalau calon tunggal menang mutlak tanpa perlawanan, nanti dia ngerasa gak butuh rakyat karena gak punya saingan,” (Wawancara dengan Arif, masyarakat Desa Sikapat pada 21 Februari 2026).

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Eka, masyarakat Desa Susukan:

“Biasanya kita antusias kalo ada banyak pasangan calon, *lha* ini cuma ada satu foto. Banyak warga sini juga berpikir kalo cuma satu, ya mending gak usah ada pilihan sekalian. Kalo kolom kosong menang kan nanti bupatinya ditunjuk pusat melalui PJ. PJ itu kan ASN, otomatis mereka punya netralitas dan tugasnya cuma transisi. Logikanya kan gini mbak, bupati yang borong partai itu nantinya pasti banyak hutang budi ke partai, nah jadi nanti kebijakannya buat rakyat atau buat bayar utang ke partai? Kan kita gatau,” (Wawancara dengan Eka, masyarakat Desa Susukan pada 21 Februari 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, tergambar kalkulasi risiko terkait masa transisi kepemimpinan. Masyarakat secara logis menilai bahwa dipimpin oleh seorang Pj Bupati selama masa transisi jauh lebih aman dan menguntungkan kepentingan publik. Hal ini dikarenakan status PJ sebagai ASN dianggap memiliki netralitas birokrasi dan tidak terbebani oleh adanya hutang politik kepada mesin partai manapun. Sebaliknya, masyarakat menilai bahwa pasangan calon tunggal yang didukung oleh hampir seluruh partai politik dikhawatirkan nantinya akan menghasilkan kebijakan yang terdistorsi demi membalas jasa koalisi.

Selain itu, faktor lain yang memengaruhi perilaku pemilih adalah ketidakpercayaan terhadap partai politik. Seharusnya, partai politik berfungsi sebagai wadah untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan masyarakat secara luas. Selain itu, partai politik memainkan peran penting sebagai sarana komunikasi politik, alat sosialisasi politik, media pendidikan politik, mekanisme kaderisasi, serta menjalankan berbagai fungsi lain yang mendukung pembentukan dan pengembangan partisipasi politik masyarakat.

“Kan partai banyak, kok gak ada yang mau ngusung calon... Kecuali di Banyumas gak ada orang pinter lah,” (Wawancara dengan Suwandi, Koordinator Wilayah Koalisi Rakyat Banyumas (KRB) di Kecamatan Sumbang pada 29 November 2025).

Sebagian masyarakat menilai bahwa partai politik di Banyumas gagal menjalankan fungsi sebagaimana mestinya, sehingga mendorong pemilihan kolom kosong sebagai respons kalkulatif untuk menekan perubahan institusional. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak, peneliti menganalisis fenomena ini melalui pendekatan rasional. Masyarakat Kecamatan Sumbang sebagai pemilih menunjukkan tingkat kecerdasan politik yang tinggi, karena keputusan mereka dalam memilih tidak dipengaruhi oleh pemberian uang, barang, atau keuntungan pribadi. Sebaliknya, pilihan kolom kosong mencerminkan kesadaran politik masyarakat sebagai bentuk protes yang efektif, muncul sebagai respons terhadap keterbatasan kandidat dan ketidakpuasan terhadap kualitas demokrasi substantif. Maka dari itu, memilih kolom kosong di Sumbang bukanlah sebuah perilaku yang didasari oleh sentimen pribadi semata, akan tetapi sebuah representasi tindakan rasional demi menjaga kedaulatan rakyat dan kualitas demokrasi untuk masa depan.

Faktor-Faktor Kontekstual yang Memengaruhi Kemenangan Kolom Kosong di Kecamatan Sumbang

Faktor kontekstual merupakan faktor yang bersumber dari luar individu atau bersifat eksternal. Dalam konteks ini, faktor kontekstual yang dimaksud adalah aspek-aspek eksternal yang berpengaruh terhadap kemenangan kolom kosong di Kecamatan Sumbang. Berdasarkan temuan dari wawancara dengan berbagai pihak, penelitian berhasil mengidentifikasi beberapa faktor utama yang memengaruhi kemenangan kolom kosong, antara lain:

A) Kampanye Koalisi Rakyat Banyumas (KRB)

Kemenangan kolom kosong di Kecamatan Sumbang tidak terlepas dari peran strategis gerakan kolektif kolom kosong yang melibatkan aktivis hingga tokoh masyarakat yang terjalin dalam Koalisi Rakyat Banyumas (KRB). Keberadaan Koalisi Rakyat Banyumas berfungsi sebagai faktor kontekstual yang berhasil mengubah ketidaknyamanan masyarakat terhadap fenomena pasangan calon tunggal menjadi sebuah tindakan politik yang nyata dan terorganisir. KRB hadir

memberikan legitimasi moral bagi para pemilih yang sebelumnya ragu atau takut untuk mengekspresikan kekecewaannya.

“sebenarnya kami melihat bahwasanya banyak masyarakat kecil yang tidak nyaman, akan tetapi udah mulai terlihat tumbuh kesadaran, tumbuh kecerdasan dalam masyarakat. Nah ketika mereka membuat pilihan untuk tidak memilih satu pasangan atau calon tunggal, mereka membuat pilihan kolom kosong. Cuma, untuk menyuarakan itu mereka belum memiliki keberanian. Karena disini yang menang itu wilayah kota dan Sumbang. Masyarakat perkotaan kan didominasi oleh orang-orang yang melek informasi, mereka mampu membaca, mereka juga mengenal atau mengetahui figur-figur yang dijadikan sebagai cabup dan cawabup. Ketika kemudian terjadi Gerakan penolakan melalui KRB dengan mensosialisasikan kolom kosong ditangkap oleh publik diluar wilayah Sumbang itu dengan gegap gempita. Sehingga mereka seakan-akan *“gayung bersambut nih”, “gua ga salah nih ga milih mereka? Ga dikatakan sebagai golput?”* (Wawancara dengan Setya Adri Wibowo, Ketua Gerakan Koalisi Rakyat Banyumas (KRB), pada 8 November 2025”

Menurut Bowo dalam wawancara tersebut, banyak masyarakat yang tidak nyaman dan ingin mengekspresikan ketidakpuasan hingga kekecewaan, namun belum memiliki keberanian. Tujuan dari gerakan ini ialah untuk menjaga demokrasi yang dinilai telah bergerak mundur karena hanya diikuti oleh satu pasangan calon. Maka dari itu, Koalisi Rakyat Banyumas (KRB) dengan Setya Adri Wibowo sebagai ketua umum dari gerakan ini berusaha menjadi garda terdepan bagi masyarakat yang memang merasa kecewa dengan adanya satu pasangan calon saja. Dalam hal ini, KRB efektif meyakinkan publik bahwa pilihan kolom kosong bukanlah bentuk apatis (golput), akan tetapi sebuah kontribusi aktif dalam menjaga marwah demokrasi yang dinilai sedang bergerak mundur.

“Adapun kenapa di Sumbang yang notabenenya basis merah dan basis ijo bisa menang ya karena itu bentuk jerih payah dari tim koalisi rakyat banyumas (KRB) itu sendiri yang mau bekerja,” (Wawancara dengan Suwandi, Koordinator Wilayah KRB Sumbang, pada 29 November 2025).

Gerakan di dalamnya terdiri dari berbagai aktivis hingga tokoh-tokoh masyarakat maupun agama serta sebagian besar aktivis maupun tokoh penggerak kolom kosong ini memang berasal dari Sumbang, sehingga hal ini secara efektif meruntuhkan tembok dominasi “basis merah” dan “basis ijo” yang selama ini dianggap sebagai norma tradisional yang tidak bisa ditembus. Berdasar hasil wawancara tersebut, Strategi kampanye yang mereka gunakan adalah dengan menggabungkan unsur tradisional hingga berbasi digital menjadi kunci kemenangan di wilayah ini. Selain itu, KRB juga menggelar pawai keliling

menggunakan mobil di setiap kecamatan dan memasang baliho terkait pilihan kolom kosong di tiga lokasi strategis, yaitu perempatan Tanjung, Pasar Karanglewas, dan sekitar Lapangan Glempang. Intervensi kontekstual yang masif ini pada akhirnya berhasil mendorong perubahan perilaku pemilih secara kolektif, menggeser loyalitas yang semulanya tertuju pada partai politik menuju solidaritas kelompok protes masyarakat. Melalui peran KRB, kolom kosong di Kecamatan Sumbang tidak hanya sebatas pilihan administratif, melainkan menjadi simbol perlawanan dan harga diri masyarakat yang menginginkan ruang partisipasi yang bermakna.

B) Ketiadaan Kandidat Alternatif

Fenomena kolom kosong dalam Pilkada Banyumas 2024 bukanlah sekadar persoalan administratif mengenai jumlah kontestan, tetapi persoalan kegagalan representasi yang menimbulkan kejenuhan kolektif. Banyak masyarakat yang menyayangkan dengan hanya tersedianya satu pasangan calon saja. Bahwasanya, masyarakat menilai Kabupaten Banyumas masih memiliki kandidat-kandidat potensial yang dapat bertarung dalam kompetisi elektoral tersebut. Ketiadaan calon alternatif menjadi faktor krusial yang mengubah persepsi publik terhadap partai politik, dari yang semulanya dianggap sebagai wadah aspirasi menjadi entitas yang hanya menginginkan kepentingan elite melalui praktik “borong partai”. Masyarakat menyayangkan ketiadaan kandidat potensial lainnya, menilai bahwa Kabupaten Banyumas memiliki banyak calon yang layak, namun adanya koalisi besar yang mendukung pasangan calon tunggal Sadewo-Lintarti ini menghalangi kompetisi. Seperti yang dikatakan informan dalam wawancara sebagai berikut.

“Saya punya anak punya mantu justru gak pada milih. Saya tanya *“kenapa kamu gak memilih? Kamu kan diberi hak untuk berpolitik oleh negara...”* jawabannya *“halah pak, calonne ora mutu,”* saya jawab lagi lah, *“tapi adanya hanya itu, kalau gak suka ya milih yang lain, kalo kotak kosong yang menang akan ada Pilkada ulang, muncullah calon lain.”* Tapi anaknya tetep gak mau. Nah itu kan bentuk kekecewaan yang nyata,” (Wawancara dengan Satum, masyarakat Desa Sumbang Kecamatan Sumbang pada 16 Desember 2025).

Selain itu, ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik tertentu juga disampaikan ibu Eni, masyarakat Desa Tambaksogra sebagai berikut:

“Kami (masyarakat) sebenarnya sudah tidak percaya lagi dengan partainya. Terlebih melihat dari kepemimpinan lalu yang diusung partai tersebut kan jadi males. Sudah jenuh dengan kepemimpinan sebelumnya,” (Wawancara dengan Eni, masyarakat Desa Tambaksogra pada 6 Desember 2025).

Ketidakpuasan ini kemudian semakin diperkuat oleh konteks pengkhianatan ekspektasi akibat adanya dinamika perubahan arah dukungan elite yang terjadi secara mendadak. Pada awalnya muncul Koalisi Banyumas Merdeka (KBM) yang terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, Nasdem, dan PSI dengan Gerindra yang sebelumnya menjadi pionir dibentuknya KBM untuk mendukung pasangan calon Ma'ruf Cahyono-Rachmat Imanda, kemudian secara tiba-tiba berubah haluan dan menyatakan dukungannya kepada pasangan Sadewo-Lintarti pada detik-detik akhir masa pendaftaran. Hal ini menyusul Rachmat Imanda yang mundur dari Partai Gerindra yang kemudian berbuntut panjang pada dibubarkannya Koalisi Banyumas Maju (KBM). Satu persatu partai mulai berpindah haluan dan merapat pada koalisi partai pengusung pasangan calon.

Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Satum, masyarakat Desa Sumbang sebagai berikut.

“Memang banyak masyarakat yang kecewa karena itu. Mereka bilang *“kenapa sih pak, Pak ini katanya mau nyalon kok malah gajadi nyalon?”* salah satunya kan ya itu Sekjen MPR RI, Ma'ruf Cahyono. Kan sebelumnya udah terpampang di jalan-jalan itu banyak calon-calonnya, *lha* kok tiba-tiba gak jadi kan aneh,” (Wawancara dengan Satum, masyarakat Desa Sumbang pada 16 Desember 2025).

Wawancara tersebut menggambarkan kekecewaan masyarakat karena ketiadaan pasangan calon lain. Secara kontekstual, spanduk dan baliho calon alternatif sebelumnya (Ma'ruf Cahyono-Yulianti Supriyatiningsih) telah memadati ruang publik di Sumbang sehingga menciptakan harapan akan adanya kompetisi yang adil. Ketika figur-figur tersebut menghilang akibat dari kesepakatan elit pada tingkat pusat, masyarakat menilai bahwa terdapat manipulasi politik. Perubahan haluan dukungan partai politik ini tidak serta merta membuat masyarakat otomatis untuk mengikuti perubahan arah dukungannya. Pendapat ini kemudian diafirmasi oleh Arie Suprpto, Sekretaris DPC PDIP Banyumas berikut.

“Ah ngapain, orang bukan jagoan saya,” ini yang harus adik-adik pahami bahwa dampak elektoral tidak akan berpengaruh berbanding lurus dengan dukungan partai. Parpol kesini semua, terus pendukung-pendukungnya kesini? Enggak. Mungkin itu udah terlanjur cinta dengan pasangan calon sebelumnya. Otomatis kan males datang ke TPS, mungkin sakleknya lagi datang ke TPS nyoblosnya kolom kosong,” (Wawancara dengan Arie Suprpto, Sekretaris DPC PDIP Banyumas pada 15 Desember 2025).

Hal tersebut juga disampaikan oleh Kepala Biro Suara Merdeka Banyumas berikut.

“Mungkin juga ada yang tadinya di parpol yang akhirnya gabung sama pasangan Pak Dewo itu, tadinya kan mereka menuntut koalisi sendiri, tapi karena sudah tidak ada calon yang memenuhi syarat dan *deal* politiknya ya, akhirnya mereka kan secara kelembagaan partainya merekomendasikan disini, tapi ini kan keliatannya di tingkat elitnya, tapi di tingkat *grassroot*, di tingkat jaringan partai mereka itu kan tidak serta merta mendukung disini, ada sempalan-sempalan yang mengekspresikan lewat kolom kosong,” (Wawancara dengan Agus Wahyudi, Kepala Biro Suara Merdeka Banyumas pada 17 November 2025).

Secara keseluruhan, masyarakat Kecamatan Sumbang memilih kolom kosong dikarenakan ketiadaan kandidat lain yang mendorong mereka untuk memilih kolom kosong sebagai bentuk penolakan. Hasil akhir mencatat perolehan suara kolom kosong 40,56% dari total suara dalam Pilkada Banyumas dan perolehannya yang unggul di Kecamatan Sumbang dengan perolehan 23.618 (50,90%) dari total suara, hal ini dinilai kolom kosong sudah berhasil merepresentasikan ketidakpuasan masyarakat terhadap partai politik. Hal ini kemudian dibenarkan oleh Sony Bharata, mantan ketua DPD PSI Banyumas yang mengatakan bahwa sejatinya kolom kosong menang dengan perolehan suara 40,56% karena itu murni ketidakpuasan masyarakat terhadap partai, bukan melalui embel-embel kekuasaan ataupun biaya. Istilah borong partai juga kerap mereka gunakan dalam kontestasi Pilkada Banyumas 2024 lalu.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Sumbang lebih memilih kolom kosong karena didasari oleh 3 pendekatan perilaku pemilih, yaitu sosiologis yang tercermin pada pengaruh dari masifnya gerakan Koalisi Rakyat Banyumas (KRB) juga dipengaruhi oleh faktor interaksi sosial kedekatan kekerabatan, psikologis yang lebih menekankan perasaan kekecewaan pada indikator orientasi kandidat, dan pendekatan rasional dimana masyarakat mengekspresikan tindakan protes melalui pilihan non konvensional yang lahir dari adanya perhitungan untung rugi. Namun, faktor yang paling dominan adalah pendekatan rasional, yang tercermin dari perilaku masyarakat Kecamatan Sumbang sebagai pemilih yang menunjukkan kecerdasan politik. Mereka menentukan pilihan bukan karena dorongan uang, barang, atau keuntungan pribadi, melainkan sebagai wujud kesadaran politik, dengan menggunakan kolom kosong sebagai mekanisme protes yang efektif di tengah keterbatasan kandidat dan ketidakpuasan terhadap kualitas demokrasi substantif.

Selain itu, faktor kontekstual atau faktor dari luar individu yang memengaruhi kemenangan kolom kosong tercermin pada adanya kampanye KRB sehingga membentuk opini kolektif dan ketiadaan kandidat alternatif. Meskipun pasangan Sadewo-Lintarti memenangkan Pilkada Kabupaten Banyumas dengan perolehan 59,44%, dibanding suara kolom kosong 40,56% suara di Banyumas, kekuatan suara kolom kosong di wilayah Sumbang dengan perolehan 50,90% suara menandakan adanya krisis kepercayaan dan kekecewaan mendalam terhadap elite politik dan juga demokrasi yang disajikan pada Pilkada Banyumas 2024 lalu.

DAFTAR PUSTAKA

- Asfar, Muhammad. (2002). *Model-Model Pemilihan Di Indonesia*. Surabaya: Pushedam.
- Abdulrahman, R. (2024). *Ini Daftar Anggota DPRD Kabupaten*. Ppid.Rri.Go.Id.
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrKHRFL45tpBwIAcG3LQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1773033547/RO=10/RU=http%3A%2F%2Fppid.rri.go.id%2Fdownload%2Fdokumen%2Fini_daftar_anggota_dprd_kabupaten_banyumas_2024.pdf%2F250675/RK=2/RS=_brwPlb
- Aqsah, Bs, M. (2024). Faktor Kemenangan Kotak Kosong Pada Pilkada Kota Makassar 2018. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(3), 9428–9431.
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/31265%0Ahttp://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/download/31265/21095>
- AZ-ZAHRA, N. A. (2025). PERILAKU POLITIK MASYARAKAT SUKU BANTEN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR (Dinamika Politik di Wilayah Pedesaan dan Perkotaan). *Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik*, 3(1), 452–465. <https://doi.org/10.71128/kybernology.v3i1.271>
- Birch, S., & Dennison, J. (2019). How protest voters choose. *Party Politics*, 25(2), 110–125. <https://doi.org/10.1177/1354068817698857>
- Budiardjo, Miriam. (2010). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Guerrero, S. H. (2009). The Disenchanted Voter: Emotional Attachment, Social Stratification, and Mediated Politics in Mexico's 2006 Presidential Election. *The International Journal of Press/Politics*, 353-375.
- Hartas, D. A. Kushandajani & Erowati, D. (2023). Political Behavior and Actors in the Victory of Empty Boxes in Eight Villages in the 2020 Wonosobo Regional Head. *Perspektif*, 12(2), 729–737. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i2.8812>
- Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1976). *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*. Cambridge: Harvard University Press.

- Hutcheson, D. S. (2006). Disengaged or disenchanted? the vote 'against all' in post-communist Russia. *Journal of Communist Studies and Transition Politics*, 98-121.
- Ilham, & Purwaningsih, T. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Pemilih Dalam Kemenangan Kotak Kosong Pada Pemilihan Walikota Makassar 2018. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 5(2), 164. <https://doi.org/10.24198/jwp.v5i2.30297>
- Istianah, R., Devriansyah, A., Apandi, A. P., & Fauziah, A. (2025). Perilaku Pemilih dan Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Kota Sukabumi Tahun 2024. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(1), 35–47. <https://doi.org/10.56552/jisipol.v7i1.277>
- KPU Kabupaten Banyumas. (2025). *DINAMIKA PENCALONAN: Fenomena Calon Tunggal di Banyumas*. Kabupaten Banyumas: Arta Media Nusantara.
- Lubis, Y. H., Fathurozi & Indraswara, D. (2024). Pengakuan Kolom Kosong (Blank Vote) Sebagai Surat Suara Dala Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Prinsip Negara Hukum Demokratis. *Journal of Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 Nomor 1, 1-16.
- Mahpudin. (2021). Memilih Untuk Tidak Memilih: Protest Voting Dalam Pemilu Lokal di Kabupaten Lebak, Banten. *Inovasi*, 18(2), 237–249. <https://doi.org/10.33626/inovasi.v18i2.362>
- Mulyana, D. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugraha, D. W. (2023). *Perilaku Memilih Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020 (Studi Kasus Kelurahan Karuwisi Utara)*. Skripsi. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Otjes, S., Stroebe, K., & Postmes, T. (2020). When Voting Become Protest: Mapping Determinants of Collective Action Onto Voting Behaviour. *Social Psychological and Personality Science* Voll 11, no.4, 513-21.
- Panjaitan, M., Rajagukguk, J., & Hulu, S. B. F. (2024). Analisis Proses dan Faktor Penyebab Lahirnya Pasangan Calon Tunggal Versus Kotak Kosong Pada Pilkada Serentak Tahun 2020. *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(1), 902–907. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i1.3806>
- Purba, C. C. (2017). Hubungan Faktor Sosiologi dan Faktor Psikologis Terhadap

Perilaku Memilih Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Pelalawan Tahun 2015 di Kecamatan Bandar Petalangan. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 4(2), 1–15.

Purwoko, B. (2005). *Demokrasi Mencari Bentuk Analisis Politik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Rahman, R. A., Satriawan, I., & Diaz, M. R. (2022). Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan dan Ancaman bagi Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 1, 48-72.

Ramadani, R, Asriati, & Wahida. (2025). PROTEST VOTE: MITIGATING THE IMPACT OF SINGLE CANDIDATES IN LOCAL HEAD ELECTIONS. *DIPONEGORO LAW REVIEW*, 85-104.

R. Siti Zuhro, Sumarno, Wienny Pahlemy, Nurul Rochayati, Lilis Mulyani, I. I. (2009). Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesenambungan: Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali. In *Penerbit Ombak*. Penerbit Ombak.

Singgih Wiryono, I. R. (2024). *Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah*. Kompas.Com.
<https://nasional.kompas.com/read/2024/05/07/20142991/kandidat-versus-kotak-kosong-pada-pilkada-2024-diperkirakan-bertambah>.

Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. PT Grasindo.

Universitas Airlangga. (2024). *Dosen FISIP UNAIR tanggapi fenomena kotak kosong di Pilkada*. Unairnews. <https://unair.ac.id/dosen-fisip-unair-tanggapi-fenomena-kotak-kosong-di-pilkada/>

Winarno. (2002). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Garuda Pustaka Utama.

Yanuar, S. (2024). *Soal Vandalisme Spanduk Kotak Kosong di Sumbang Banyumas, Polisi Beri Keterangan*. SERAYUNEWS. <https://serayunews.com/soal-vandalisme-spanduk-kotak-kosong-di-sumbang-banyumas-polisi-beri-keterangan>